

5.2. Saran (Rekomendasi Kebijakan)

Sektor usaha informal cenderung memiliki karakter yang khas yang tidak bisa disamakan dengan sektor usaha formal. Oleh karena itu pilihan kebijakan terhadap sektor ini mesti dibingkai dalam cara berpikir pemberdayaan. Jika kerangka pikir ini dipakai, maka pemetaan modal sosial sebagai modal khas sektor informal perlu dipetakan dan alternatif kebijakan penguatannya. Secara umum, pemetaan kebijakannya dapat dilihat pada matriks berikut.

No	Jenis Aset	Potensi	Pilihan Kebijakan
1	Modal Sosial Usaha	Kepercayaan (trust) antar warga/pelaku usaha informal <u>Saling mendukung dalam usaha Usaha "komunal"</u>	• Mengurangi program karikatif langsung ke masyarakat sehingga tidak mereduksi modal sosial warga • Mengembangkan program bantuan baik modal, manajemen, skill berbasis pada organisasi yang berkarakter "warga dengan modal sosial".
2	Skill	Meskipun masih terbatas, keterampilan khas usaha kecil yang diperoleh dan ditingkatkan secara otodidak <u>"bakat usaha/bisnis" yang dapat dikembangkan</u>	• Mengembangkan sistem "sharing skill" antarwarga namun bukan melalui mekanisme birokratis

Matriks ini hendak menjelaskan bahwa mengurangi pendekatan karikatif penting untuk dilakukan sebagai bagian untuk terus mendorong tumbuh dan bertahannya modal sosial dalam usaha yang dimiliki warga. Program berkarakter karikatif yang terus menerus terutama dilakukan pemerintah akan menumbuhkan proses belajar tentang posisi dan peran pemerintah sebagai “pemberi” dan warga sebagai “penerima”. Kondisi ini di satu sisi memperberat tanggungjawab pemerintah dan disisi lain juga melemahkan kapasitas warga dalam menyelesaikan persoalannya.

Sehubungan dengan hal ini, bantuan pemerintah baik dalam bentuk dana maupun keterampilan hendaknya tidak diberikan secara langsung oleh pemerintah. “stereotype negatif” dana (pemberdayaan) pemerintah perlu diantisipasi dengan menyalurkannya secara tidak langsung kepada kelompok sasaran melalui organ yang memiliki karakter “sosial” sehingga kompatibel dengan modal sosial dasar warga seperti koperasi yang dalam penelitian ini menjadi salah satu pilihan warga mengakses dana/modal usaha.

Oleh karena itu terkait dengan pengembangan sektor usaha informal, maka dalam penelitian ini ada dua alternatif kebijakan yang dapat dipilih/diambil pembuat kebijakan Pemerintah Kota Kupang.

Opsi pertama : *Mendorong sektor informal menjadi sektor transisi bagi tenaga kerja terutama usia produktif menuju sektor ekonomi formal.* Opsi ini dapat dipilih jika asumsinya adalah sektor formal menjadi sektor utama penyerap tenaga kerja dan penopang utama ekonomi Kota Kupang. Oleh karena itu sektor informal diposisikan menjadi media pembelajaran managerial dan keterampilan sebagai

modal memasuki sektor ekonomi formal. Opsi ini dapat dioperasionalkan dalam beberapa agenda :

- a. Pengembangan profile sektor usaha informal sebagai database kebijakan namun bukan dalam bentuk instrumen perizinan birokratis yang memberatkan kedinamisan sektor usaha informal.
- b. Mengadakan dan memperkuat pusat-pusat “pemberdayaan usaha informal” yang menyediakan konsultasi bisnis, penguatan keterampilan serta informasi pasar.

Opsi Kedua : *Mendorong terbentuk dan menguatnya “pengusaha Informal” terutama bagi tenaga kerja usia produktif.* Opsi ini dipilih jika asumsinya adalah sektor informal ditempatkan sejajar dengan sektor ekonomi/usaha formal karena dianggap memiliki prospektif secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sektor informal tidak diposisikan sebagai sektor transisi menuju sektor formal, namun justru menjadi orientasi akhir kebijakan dalam wujud/bentuk adanya “pengusaha informal” sebagai peralihan terakhir dari jenjang pekerja lepas/rumahan sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut⁵.

⁵ Diadopsi dari model *Chen (2007) (dalam Nazara, 2010)*